

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.68 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

I. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan.

1. **Nama Organisasi** : Kementerian Perhubungan
2. **Tugas** : Menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
3. **Fungsi** :
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
4. **Indikator Kinerja Utama (IKU):**

SASARAN STRATEGIS (SS)	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
a. Menurunnya dampak sektor transportasi terhadap LINGKUNGAN.	1) Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional.	juta liter/tahun
	2) Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional.	Juta ton/tahun
b. Meningkatnya manfaat sektor transportasi terhadap pertumbuhan EKONOMI.	3) Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.	Prosentase (%)

SASARAN STRATEGIS (SS)	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
c. Meningkatkan KESELAMATAN transportasi.	4) Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan.	kejadian/ tahun
d. Meningkatkan KEAMANAN transportasi.	5) Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan.	kejadian/ tahun
e. Meningkatkan PELAYANAN transportasi.	6) Rata - rata prosentase pencapaian <i>On-Time Performance</i> (OTP) sektor transportasi.	Prosentase (%)
f. Meningkatkan pengembangan TEKNOLOGI TRANSPORTASI yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.	7) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi.	Lokasi (unit)
	8) Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan.	lokasi
g. Meningkatkan AKSESIBILITAS MASYARAKAT terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong konektivitas antar wilayah.	9) Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi.	lintas
h. Meningkatkan KAPASITAS SARANA DAN PRASARANA transportasi untuk mengurangi <i>backlog</i> dan <i>bottleneck</i> kapasitas infrastruktur transportasi.	10) Total produksi angkutan penumpang.	penumpang/ tahun
	11) Total produksi angkutan barang.	ton/tahun
i. Meningkatkan pemenuhan STANDAR TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL sarana dan prasarana transportasi.	12) Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi.	Unit
	13) Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi.	Unit

SASARAN STRATEGIS (SS)	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
j. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan AKUNTABILITAS KINERJA, ANGGARAN, DAN BMN.	14) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan .	Nilai AKIP
	15) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini
	16) Nilai aset Negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN.	Rp
k. Peningkatan kualitas SDM.	17) Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat.	Orang
	18) Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan.	Orang
	19) Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang
l. Meningkatkan peran serta Pemda, BUMN dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi.	20) Jumlah Infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta.	Jumlah proyek yang siap ditawarkan melalui skema KPS
m. Melanjutkan reformasi REGULASI.	21) Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan.	Peraturan

II. IKU Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

A. IKU Sekretariat Jenderal

1. **Nama Organisasi:** Sekretariat Jenderal
2. **Tugas** : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. **Fungsi** :
 - a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, dan program Kementerian Perhubungan;
 - c. Pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
 - d. Pembinaan, dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan Negara; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.
4. **Indikator Kinerja Utama (IKU):**

SASARAN STRATEGIS (SS)	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui tersedianya Dokumen Perencanaan, Pemograman, Kebijakan Pentarifan dan Dokumen Analisis dan Evaluasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan.	1) Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.	Nilai
	2) Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	Nilai
b. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Dalam Menunjang Tugas.	3) Tingkat ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase (%)
c. Terwujudnya Komunikasi dan Pelayanan Informasi Sektor Transportasi Kepada Publik Yang Didukung Oleh Sdm	4) Jumlah rekomendasi hasil analisis informasi untuk penyempurnaan kebijakan sektor transportasi.	Rekomendasi

SASARAN STRATEGIS (SS)	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Aparatur Perhubungan Dengan Kompetensi Kehumasan Untuk Meningkatkan Citra Positif Kementerian Perhubungan.	5) Indeks opini publik terhadap Kementerian Perhubungan.	Indeks
d. Terwujudnya Kerjasama Luar Negeri Baik Dalam Skala Regional Maupun Global.	6) Jumlah terselenggaranya kerjasama luar negeri di bidang transportasi.	Kerjasama
e. Kecukupan Sarana Prasarana Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Secara Efektif dan Efisien.	7) Penghematan biaya energi, air, dan telepon di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan.	Rp
	8) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Setjen.	Prosentase (%)
f. Terwujudnya Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Netral, <i>Capable</i> , Profesional, Berkinerja Tinggi dan Sejahtera Serta Beretika.	9) Jumlah aparatur Kementerian Perhubungan yang telah memenuhi kualitas dan kompetensi.	Orang
	10) Tersusunnya standar kompetensi jabatan aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Standar
	11) Tersusunnya regulasi terkait SDM aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Regulasi
g. Terwujudnya Organisasi Yang Tepat Fungsi dan Tepat Sasaran Melalui Sistem, Proses dan Tata Laksana Yang Rasional, Jelas, Efektif, Efisien, Terukur, Dan Sesuai dengan visi Reformasi Birokrasi.	12) Jumlah laporan penataan organisasi/kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Kemenhub.	Dokumen
	13) Persentase unit kerja yang telah memenuhi kaidah kelembagaan yang baik	Prosentase (%)
h. Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (LRA, Neraca dan CaLK) Dengan Penilaian Opini	14) Opini BPK atas pengelolaan keuangan Kementerian Perhubungan.	Opini